**PERAN BANMUS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 47 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN DPRD**

Leni Ontulu¹, Arifin Tumuhulawa², Roby W. Amu³ Yusriyanto Kadir⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo JL. Jenderal Sudirman No.247,
Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo 96211.
Indonesia

Email: ontululeni@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the Deliberative Council (BANMUS) based on Article 47 of Government Regulation Number 16 of 2010 concerning Guidelines for Drafting Regional People's Representative Council (DPRD) Regulations concerning the Rules of Regional People's Representative Council (DPRD), as well as its working mechanism in improving DPRD performance. This study uses the library method to obtain theoretical conceptions, opinions, and thoughts from previous studies related to the object of research. The results of the study show that BANMUS has a role in coordinating the agenda for council activities, setting hearings, deliberating regional regulations (Perda), and providing opportunities for the council's apparatus to provide input. BANMUS also plays a strategic role as a planner and can overcome deadlocks in DPRD plenary meetings. This research recommends that DPRD members who are involved in BANMUS coordinate the activity agenda properly according to statutory regulations, and play a role according to the regulated mechanism. The DPRD's work must be according to the schedule planned through the DPRD's BANMUS internal meeting. This research reveals the importance of the role and work mechanism of BANMUS in improving the performance of the DPRD and its members..

Keywords: BANMUS, Performance, DPRD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Musyawarah (BANMUS) berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta mekanisme kerjanya dalam meningkatkan kinerja DPRD. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat, dan pemikiran dari penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BANMUS memiliki peran dalam mengkoordinasikan agenda kegiatan dewan, penetapan sidang, pembahasan peraturan daerah (Perda), dan memberikan kesempatan bagi alat kelengkapan dewan untuk memberikan masukan. BANMUS juga berperan strategis sebagai perencana dan dapat mengatasi deadlock dalam

rapat paripurna DPRD. Rekomendasi penelitian ini adalah agar anggota DPRD yang terlibat dalam BANMUS mengkoordinasikan agenda kegiatan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, serta berperan sesuai mekanisme yang telah diatur. Kerja DPRD harus sesuai jadwal yang direncanakan melalui rapat internal BANMUS DPRD. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran dan mekanisme kerja BANMUS dalam meningkatkan kinerja DPRD dan anggotanya.

Kata Kunci : *BANMUS, Kinerja, DPRD*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjadikan hukum sebagai dasar utama setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara, baik itu urusan ketatanegaraan yang mengatur pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang bersentuhan dengan urusan negara maupun urusan yang langsung dengan urusan pemerintahan. rakyat. Termasuk bagaimana pola hubungan kerjasama antara lembaga negara, badan hukum negara satu sama lain, hubungan pemerintah pusat dan daerah, juga berkaitan dengan hubungan pemerintah (eksekutif) dengan DPR, pemerintah daerah dengan provinsi, kabupaten dan kota, DPRD.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUD 1945 lebih jelas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan: "Indonesia adalah republik dalam arti negara kesatuan. :Persatuan di Indonesia" Hal ini menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan telah dideklarasikan dengan suara bulat dan secara konstitusional dimasukkan ke dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), baik sebelum maupun sesudah Pancasila dan UUD 1945. amandemen, dengan harapan dapat mempersatukan seluruh masyarakat nusantara yang luas dan terpecah menjadi pulau-pulau dan kepulauan yang menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa.

Mengapa pemerintah daerah dan DPRD disebut sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah? karena DPRD merupakan badan legislatif daerah dalam negara kesatuan, oleh karena itu biasa disebut demikian. Negara kesatuan adalah negara yang monosentris (berpusat) dan terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif

yang berlaku untuk seluruh wilayah yang bersangkutan¹. Jenis negara ini juga dikenal sebagai negara. Dia dikelola oleh satu pemerintahan, yang mencakup pemerintah pusat dan daerah, baik kegiatan dilakukan di dalam maupun di luar. Negara yang merupakan negara kesatuan memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas semua wilayah atau daerah yang sepenuhnya dikendalikan oleh satu pemerintah pusat². Karena daerah dalam negara kesatuan sebenarnya tidak mempunyai wewenang, maka harus ada pelimpahan wewenang untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan³. sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi yang sangat besar kepada daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kekuasaan kepada masyarakat atas masyarakatnya, dan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi. mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui otonomi luas.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, asas otonomi daerah menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa daerah diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan selain urusan Pemerintah Pusat. Kebijakan daerah dapat dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan, meningkatkan partisipasi, memulai proyek baru, dan memberi komunitas lebih banyak kekuatan.

Titik baru dalam konstitusionalisme Indonesia tampaknya telah dimulai dari bawah sejak reformasi tahun 1998. UUD 1945 telah diubah empat kali antara tahun 1999 dan 2002. Bangsa kita telah mengadopsi pemisahan atau pembagian kekuasaan, pipi dan perimbangan, dan prinsip negara hukum untuk penyelesaian konflik politik sebagai bagian dari amandemen UUD 1945. Sejumlah lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh

¹ M. Agus Santoso. Jurnal Hukum No 4. Vol. 18 Oktober 2011: 604-620. Hlm. 605

² Ibid. Hlm. 605-606

³ Ibid. Hlm. 605-606

konstitusi maupun yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, lahir sebagai akibat dari amandemen UUD 1945.

Dalam pemerintahan daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya dalam hal pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, demokrasi menekankan pada beberapa aspek penting, antara lain unsur kekuasaan, kekakuan keputusan. pembuatan, dan pola hubungan antar penguasa. Aspek tersebut meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan antara lembaga negara di tingkat Pusat dan antara Pusat dan Daerah serta perseorangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat rakyat yang diperintah oleh prinsip demokrasi berdasarkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, perwakilan rakyat lembaga, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.

Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berdampingan dengan pemerintah daerah diperlukan untuk membangun kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian mereka dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif⁴. Oleh karena itu didalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian,

⁴ Asnawi. Jurnal Cita Hukum. Vol. No.1 Juni 2014 Hlm. 2

para penyelenggara Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggaraan harus jujur, adil terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi baru dalam bidang Pemerintahan secara keseluruhan⁵. Dan sudah waktunya untuk difikirkan bagi kepentingan pemerintahan masa depan sebuah pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif di daerah dengan menciptakan mekanisme “Checks and Balances” ditingkat lokal⁶.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan rakyat. prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan⁷.

Karena tidak ada legislatif daerah dalam negara kesatuan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun berbeda dengan kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan, DPRD hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang⁸.

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan komponen penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah. dan DPRD dipandang sebagai mitra sejajar dengan peran yang berbeda. Kepala daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan peraturan daerah, sedangkan DPRD bertugas membuat peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan⁹. DPRD dan Kepala Daerah adalah dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola oleh pengelolaan keuangan

⁵ Ibid Hlm. 3

⁶ Ibid Hlm. 3

⁷ <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.43 wita

⁸ Ibid. Hlm.3

⁹ Abdilla Fauzi Achmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. Golden Terayon Press. Jakarta. Hlm.275

daerah sistem selama pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan negara mus tidak dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, tertib, dan patut, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan¹⁰.

Meski anggota DPRD dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum, namun sulit untuk menentukan nama-nama aksesoris Badan Permusyawaratan Provinsi, Daerah, dan Daerah. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Pasal 302 ayat 1 menyebutkan, “Kelengkapan DPRD Provinsi terdiri dari: (a).Direktur, (b).Badan Permusyawaratan (c).Komisi (d).DPRD (e).Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan (g). Alat Pelengkap Tambahan yang paripurna rapat dibuat.Selain itu, “Kelengkapan DPRD Kabupaten dan Kota terdiri dari,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353a ayat (1), (a).Pimpinan (b).Badan Permusyawaratan, (c).Komisi (d).DPRD, (e).Badan Anggaran (f).badan kehormatan, (g).Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”.¹¹

Badan Permusyawaratan merupakan pelengkap tetap DPRD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Badan Permusyawaratan dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD dan diputuskan dalam rapat paripurna. Badan Permusyawaratan DPR dibentuk susunan unsur fraksi berdasarkan jumlah anggota pada masing-masing fraksi. Paling banyak setengah dari anggota DPRD menjadi Badan Permusyawaratan DPR.¹²

Ketua, Sekretaris, dan Anggota merupakan susunan organisasi Badan Permusyawaratan. Karena jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD merupakan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan. Sekretaris DPRD merangkap jabatan Sekretaris Badan Permusyawaratan Dewan tetapi tidak merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan. Badan Permusyawaratan dapat disebut sebagai Dewan miniatur karena keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil semua fraksi DPRD di bawah pimpinan DPRD.

¹⁰ Ibid Hlm.275

¹¹ Dadang Suwanda dan Chabib Soleh. 2018. *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung . Hlm.1

¹² <http://parlemenindonesia.org> , diakses tanggal 29 Mei 2022 pukul 15.25 wita

Peran Badan Permusyawaratan sebagai perencana, sebagai miniatur Dewan, sangat strategis. Selain itu, Badan Permusyawaratan dapat diibaratkan sebagai “petugas pemadam kebakaran” ketika kuorum rapat paripurna mandeg. Meski sempat tertunda, DPRD kuorum pengambilan keputusan rapat paripurna mengenai hak angket dan hak mengeluarkan pendapat diundur selama tiga hari. Ketika hal-hal tersebut terjadi, keputusan Badan Permusyawaratan menjadi sangat penting. Misalnya, rapat tidak bisa memutuskan bagaimana menggunakan hak angket, bagaimana mengeluarkan pendapat, memecat pimpinan DPRD, atau membuat peraturan daerah, dan rapat paripurna DPRD tidak bisa diulang. Baik buruknya kinerja DPRD dan anggotanya juga dipengaruhi oleh Badan Permusyawaratan. Anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan DPRD (BANMUS) memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik partai politik yang diwakilinya. Namun secara normatif, mereka harus berperan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada sisi ini, kerja Badan Permusyawaratan DPRD sering mengalami dinamika yang tinggi dan terkadang menghambat kinerja DPRD, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme kerja DPRD sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan melalui mekanisme rapat internal Badan Permusyawaratan DPRD (BANMUS). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkanya dalam satu karya ilmiah mengangkat judul: “Peran Badan Musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 47 PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD”.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif bersifat deskriptif dengan metode kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat, dan pemikiran dari penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Badan Permusyawaratan (BANMUS) Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hubungan pengawasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Permusyawaratan (BANMUS), keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga agar DPRD tidak menyimpang dari norma, undang-undang, dan pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. DPRD dan BANMUS berperan dalam memajukan kesejahteraan penduduk daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik.¹³

Perangkat DPRD, termasuk BANMUS, dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD dan memiliki peran membantu DPRD dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan¹⁴. Pasal 302 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 mengatur tentang susunan dan tugas BANMUS.

Fungsi utama aparatur DPRD, termasuk pimpinan DPRD dan BANMUS, meliputi memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelembagaan secara umum, memimpin rapat, memberikan sanksi atau rehabilitasi, mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga eksekutif dan lembaga tinggi negara lainnya, serta melaksanakan keputusan DPRD.¹⁵

BANMUS sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki tanggung jawab yang dituangkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Tanggung jawab tersebut meliputi penentuan agenda DPRD, memberi nasihat kepada pimpinan DPRD, memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan informasi dan penjelasan, menetapkan jadwal rapat DPRD, memberikan saran, merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan menyelesaikan tanggung jawab tambahan melalui rapat paripurna.¹⁶

¹³ | Gusti Ayu Bunga Dwi Utami dan I Ketut Sudiarta. *Makalah Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Universitas Udayana Hlm.3

¹⁴ Ibid Hlm.4

¹⁵ <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.43 wita

¹⁶ Ibid Hlm.6

Dalam kajian kewenangan, BANMUS memiliki kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organ pelengkap DPRD. Kewenangan pemerintahan melibatkan pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, dan pemberian serta pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penegakan hukum, BANMUS memiliki peran dalam menerapkan dan menegakkan hukum, menciptakan ketaatan, melaksanakan perintah undang-undang, mengawasi pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara, serta menjalankan fungsi kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari segi teoretis, peneliti dapat mengatakan bahwa ada tiga cara untuk mendapatkan wewenang: atribusi, delegasi, dan mandat. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa dalam literatur hukum administrasi, ada dua metode utama untuk mendapatkan otoritas pemerintah atribusi dan delegasi. Sementara mandat kadang-kadang dapat ditempatkan secara terpisah, mandat menjadi satu kesatuan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara yang dipisahkan.

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Rakyat (BANMUS) memenuhi tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Tanggung jawab tersebut antara lain mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan agenda kegiatan dewan, menunjuk rapat, menentukan waktu pembahasan peraturan daerah (Perda), dan menyediakan¹⁷

2. Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan (BANMUS) dalam mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Johny Lumolos, peningkatan kapasitas DPRD dalam melaksanakan demokrasi secara tegas memerlukan peningkatan peran lembaga perwakilan rakyat di legislatif. Kemampuan menampung aspirasi rakyat sangat menentukan peran wakil rakyat. Dalam intinya, perlu agar

¹⁷ Ibid Hlm.5

lembaga perwakilan rakyat pilihan rakyat yang dipilih secara demokratis dapat berjalan. Pemerintah daerah menyiapkan program dan kegiatan serta anggaran anggaran dalam bentuk peraturan daerah, yang dibahas dengan DPRD dan disebut sebagai Daerah. Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda-APBD). Peraturan tersebut dilimpahkan dari pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan desentralisasi, yang berlaku selama satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah merupakan struktur peraturan daerah (APBD) untuk pendapatan daerah. dan anggaran belanja.¹⁸

Kinerja adalah hasil dari pekerjaan atau aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu. Bergantung pada bagaimana setiap organisasi diperiksa, kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut. Karena kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi, sekelompok orang, atau yang dapat dilakukan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya secara tepat waktu dalam jangka waktu tertentu, setiap karyawan harus dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.¹⁹

Keberhasilan organisasi biasanya diukur dengan kinerja, yang merupakan konsep abstrak. Menurut August W. Smith, kinerja adalah hasil atau keluaran dari suatu proses yang dicapai, prestasi yang ditunjukkan, atau kemampuan bekerja. Dikatakannya bahwa kinerja adalah hasil atau keluaran dari proses penggerak, baik itu manusia maupun bukan. Pengertian kinerja DPRD adalah prestasi kerja pegawai, yang dinilai berdasarkan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Mangkunegara pengertian pelaksanaan adalah hasil kerja secara kualitas dan jumlah yang dicapai seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya²⁰. sebagai delegasi individu, dan untuk menyampaikan pertimbangan keinginan individu yang dituju agar rencana strategi sesuai dengan keinginan individu yang dituju

¹⁸ Ibrahim Evans Rawung. Makalah : Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal. 2. <https://media.neliti.com>media>. Selasa. 12 Juni 2022. Pukul 13.15

¹⁹ Ibid. Hlm. 2

²⁰ Ibid. Hlm. 5

sehingga perincian strategi sesuai dengan tujuan individu di daerah ²¹. Departemen Badan Humas dan Pengembangan (DPRD) merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan sebagai penyampai suara bagi masyarakat daerah dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan sebenarnya dari kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan di daerahnya. DPRD adalah suatu badan yang tersusun dari komponen-komponen masyarakat, dimana setiap lapisan masyarakat mengirimkan wakil/wakilnya untuk memutuskan strategi yang harus dilaksanakan di ruangnya. Setiap lapisan masyarakat mengirimkan utusannya untuk menjadi anggota DPRD, yaitu badan yang dibentuk oleh masyarakat ²². Anggota dipilih melalui proses pemilihan umum dan bertanggung jawab menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan di daerahnya. terkonsentrasi di daerah itu. DPRD merupakan mitra sejajar di daerah dan menjalankan perannya sebagai Badan Legislatif Daerah. Padahal dalam menjalankan sebagai Badan Perwakilan Daerah, DPRD memiliki hak istimewa untuk menganggap kepala daerah sebagai penanggung jawab, seperti yang diungkapkan Wasistiono yang mengungkapkan bahwa kedudukan DPRD memang lebih tinggi dari kepala daerah. Namun tidak setiap hari dihabiskan dalam jabatan yang lebih tinggi tersebut ²³. Menurut UU 32 Tahun 2004 ayat (1) Pasal 44, kepala daerah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan peran DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, serta kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan dalam rangka upaya pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah dalam bentuk peraturan daerah. Jika kita menilik lebih jauh keberadaan penyelenggaraan pemerintahan negara teritorial secara khusus, maka lebih banyak rancangan pedoman provinsi yang berasal dari cabang presiden. Sebagai simbol kedaulatan rakyat, DPRD harus mampu menjadi sumber gagasan, prakarsa, dan gagasan bagi berbagai rancangan peraturan daerah ²⁴.

²¹ Ibid. Hlm. 5

²² Ibid. Hlm. 5

²³ Widharto Ishak. Jurnal Hukum. Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. Hlm.2.

²⁴ Ibid. Hlm. 2

Menurut Modeong, meski eksekutif lebih banyak terlibat dalam pembuatan rancangan perda, meski undang-undang mengatur kepala daerah harus mendapat persetujuan DPRD sebelum menetapkan perda, bukan berarti DPRD semata-mata hanya sebatas itu. bertanggung jawab memberikan persetujuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk memprakarsai perubahan dan melaksanakan hak prakarsa. Kewenangan mengambil keputusan tertuang dalam kesepakatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan kewenangan DPRD yang cukup besar dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah. badan legislatif. Secara definisi, DPRD dan eksekutif berada pada kedudukan yang setara. Namun secara de facto, anggota DPRD harus tetap menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan masyarakat.

Atas dasar uraian tersebut yang menggambarkan kedudukan DPRD dalam kaitannya dengan cita-cita negara demokrasi seperti Indonesia, maka diperlukan peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dibentuknya DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Agar DPRD dapat berfungsi efektif secara kelembagaan, juga harus menjadi motor penggerak pembangunan sistem pemerintahan yang demokratis secara empiris. Di dunia nyata, di tengah masyarakat, besar harapan masyarakat yang memberikan mandat kepada legislatif harus didemonstrasikan. DPRD merupakan lokomotif bagi pergeseran ke arah yang unggul di segala lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DPRD juga harus bisa menunjukkan bahwa saat bertemu di DPRD, badan ini tidak menentang pemerintah daerah ketika memperjuangkan aspirasi, melainkan menjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah daerah. Hal ini akan memastikan bahwa pekerjaan pencapaian pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau eksekutif, tetapi juga yang diperankan oleh DPRD. lebih strategis dan nyata, serta dapat dirasakan, dinilai, dan diukur oleh masyarakat. Meningkatkan kelembagaan DPRD kinerja, sangat strategis dan perlu partisipasi seluruh

badan atau aksesoris. agar masyarakat yang memilih DPRD memandangnya lebih strategis dan terhormat.²⁵

Menurut peneliti, negara hukum hanyalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan itu dalam segala bentuknya dijalankan berdasarkan hukum. Dengan kata lain, peran strategis DPRD dalam kerangka penempatan ranah peran harus dipastikan sebagai upaya serius dalam mewujudkan sistem negara dalam kerangka hukum jika dikaji dari perspektif negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD adalah wajib memenuhi fungsinya yang diatur. Dalam suatu aturan hukum, DPRD harus menjalankan semua tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang. Negara hukum mengatur bahwa pemerintah harus tunduk kepada undang-undang, bukan undang-undang yang harus tunduk kepada pemerintah. Agar segala upaya penyelenggaraan negara, termasuk peran DPRD di tingkat daerah, diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. tujuan, disinilah peran DPRD berperan.

Menurut Prof., sangat jelas indikator-indikator yang dapat diukur tentang bagaimana negara hukum itu diterapkan dalam sistem negara. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie kutipan dari buku Dr. Sri Sumantri Lembaga Negara Menurut UUD 1945, International Commission of Jurist juga menentukan syarat adanya pemerintahan perwakilan berdasarkan Rule of Law sebagai berikut²⁶. Dikatakannya, hal ini dapat dinilai dalam proses penyelenggaraan negara apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan seperti adanya perlindungan konstitusional, adanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, Dari indikator tersebut, peran DPRD adalah fokus pada perlindungan konstitusional, artinya semua penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada, termasuk pemerintahan daerah, di mana DPRD berperan.²⁷

²⁵ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. BIP Kelompok Gramedia. Jakarta

²⁶ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. BIP Kelompok Gramedia. Jakarta

²⁷. Ibid hlm 13

Profesor Utrecht yang bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia dikutip oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, membedakan antara negara hukum formal yang disebut juga negara hukum klasik, dan negara hukum material yang juga disebut negara hukum modern. aturan hukum, dalam perspektifnya. Hukum dan ketertiban yang tepat menyangkut pemikiran tentang peraturan formal atau terbatas, khususnya dalam arti peraturan dan pedoman yang pada dasarnya tersusun. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan hukum untuk menjaga ketertiban. Menurut Oleh karena itu, DPRD harus menetapkan segala landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang harus didasarkan pada hukum formil dan materiil yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. acuan atribusi terhadap hukum yang berlaku pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hukum dan peraturan yang berlaku untuk hal yang sama.

Itulah cara ideal untuk menjalankan negara tidak hanya berdasarkan apa yang diinginkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, tetapi juga pada undang-undang yang telah diusulkan dan kecenderungan perkembangan negara hukum modern, yang mengarah pada aturan-aturan baru yang penting. untuk mewujudkan suatu negara hukum.

Peneliti sependapat dengan pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie bahwa ada dua belas prinsip utama yang mendukung tegaknya negara hukum dalam kaitannya dengan hak-hak tersebut. Menurut peneliti, prinsip-prinsip tersebut sebenarnya merupakan pilar utama yang mendukung lahirnya negara hukum. Sebaliknya, untuk mencapai negara hukum yang ideal, harus benar-benar menegakkan supremasi hukum, kesetaraan. dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ pendukung yang mandiri, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan atau tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan negara. tujuan. DPRD akan memenuhi perannya sebagai salah satu pilar penegakan negara hukum jika dilakukan dengan benar, dan masyarakat akan sejahtera.

Sebagai lembaga negara di tingkat daerah, DPRD secara kelembagaan didukung oleh sistem kerja yang terbangun. Di dalam tubuh terdapat kelengkapan DPRD berupa pimpinan DPRD, dewan kehormatan, komisi yang

membidangi pendidikan, kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan bidang lainnya, Komisi Ekonomi, Komisi Pembangunan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). Badan Anggaran, dan Badan Permusyawaratan (BANMUS), serta perangkat pendukung lainnya yang diperlukan Badan Permusyawaratan dalam menjalankan tugasnya meliputi:

1. Menentukan mata acara DPRD untuk satu (satu) tahun sidang, satu (satu) masa sidang, atau bagian sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPRD untuk melakukan perubahan;
2. Tawarkan pendapat Anda kepada pimpinan DPRD dalam hal menetapkan garis kebijakan tentang bagaimana tugas wewenang dijalankan.
3. Meminta dan/atau memberi kesempatan kepada perangkat DPRD lainnya untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Menetapkan jadwal rapat DPRD
5. menyampaikan pendapat atau saran untuk percepatan kegiatan;
6. merekomendasikan pembentukan Panitia Kerja
7. Panitia Sudut, dan Pansus. Melaksanakan tugas tambahan yang diminta Rapat Paripurna DPRD kepada Badan Permusyawaratan.

Sebelum mengikuti Musyawarah, setiap Anggota Badan Permusyawaratan wajib berkonsultasi dengan fraksi. Selanjutnya, Menyampaikan pokok-pokok hasil Musyawarah kepada Divisi-divisi. Djaka Dwi Winarko, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan (Bamus) merupakan salah satu Alat Pelengkap Dewan (AKD) yang berperan penting baik di DPR RI maupun di DPRD. mengingat Bamus terlebih dahulu harus dikonsultasikan untuk mayoritas keputusan penting Dewan. , Bamus bertugas menentukan agenda DPR RI dan DPRD untuk satu tahun sidang, masa sidang, atau porsi sidang, serta perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.²⁸

Akibatnya, Bamus berdampak pada arah dan kinerja Dewan, termasuk tanggung jawab legislatif dan pengawasannya serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola acara selama masa percobaan. Pertama, tentukan berapa hari kerja yang diperlukan untuk setiap pertemuan AKD. Yang kedua terkait dengan legislasi, anggaran, pengawasan, dan tugas-tugas mendesak

²⁸ <http://parlemenindonesia.org> , diakses tanggal 27 Juni 2022 pukul 14.45 wita

lainnya. Cara ketiga membagi hari kerja yang tersedia sesuai dengan urgensi tugas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jadwal yang ditetapkan tidak selalu berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis di praktek. Oleh karena itu, harus direvisi dan disetujui dalam pleno.²⁹

Menurut RI Damayanti, Deputi Sekretariat Jenderal dan BK DPR, Badan Permusyawaratan (Bamus) merupakan pelengkap penting bagi DPR. Karena mayoritas keputusan krusial yang diambil DPR harus terlebih dahulu melewati Bamus, bahkan bisa dikatakan bahwa Bamus merupakan miniatur DPR. Ia mengklaim DPRD kabupaten/kota dapat mengadopsi tugas dan fungsi mekanisme DPR Bamus.³⁰

“Sebagian tugas dan tanggung jawab Bamus di DPR bisa diubah. Usai memimpin rapat konsultasi terkait peran Bamus dengan DPRD Provinsi Kalbar dan DPRD Kabupaten Kuningan di Sekretariat Jenderal dan Gedung BK DPR RI, Senayan, Jakarta, 16 April 2019, “Diketahui beberapa DPRD sudah melaksanakan dan berjalan dengan baik,” sapaan akrab Damayanti Maya.³¹

Maya menjelaskan, karena perannya yang sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan, peran Bamus seringkali menjadi bahan konsultasi bagi DPRD daerah dan provinsi. Dengan menyesuaikan kondisi internet dan peraturan masing-masing DPRD sehingga agar dapat berjalan efektif dan efisien, mekanisme rapat Bamus dan pengambilan keputusan dapat menjadi model bagi DPRD lainnya. Sebelum rapat paripurna, Bamus dapat menyelesaikan banyak persoalan. Tanpa tekanan, rapat paripurna dapat berjalan dengan lancar; jika bisa diselesaikan di Bamus, maka akan berjalan lancar sehingga mempengaruhi kinerja parlemen.

Peran Badan Permusyawaratan sebagai perencana, sebagai miniatur Dewan, sangat strategis. Selain itu, Badan Permusyawaratan dapat diibaratkan sebagai “petugas pemadam kebakaran” ketika kuorum rapat paripurna mandeg. Meski sempat tertunda, DPRD kuorum pengambilan keputusan rapat paripurna mengenai hak angket dan hak mengeluarkan

²⁹ Ibid Hlm.1

³⁰ Ibid Hlm.1

³¹ Ibid Hlm.2

pendapat diundur selama tiga hari. Ketika hal-hal tersebut terjadi, keputusan Badan Permusyawaratan menjadi sangat penting. Misalnya, rapat tidak bisa memutuskan bagaimana menggunakan hak angket, bagaimana mengeluarkan pendapat, memecat pimpinan DPRD, atau membuat peraturan daerah, dan rapat paripurna DPRD tidak bisa diulang. Baik buruknya kinerja DPRD dan anggotanya juga dipengaruhi oleh Badan Permusyawaratan. Anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan DPRD (BANMUS) memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik partai politik yang diwakilinya. Namun dari segi normatif, mereka harus berperan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga pada sisi ini, kerja Badan Permusyawaratan di DPRD seringkali mengalami dinamika yang tinggi dan terkadang menghambat kinerja DPRD, khususnya terkait dengan kemampuan mekanisme kerja berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan melalui mekanisme rapat internal Badan Permusyawaratan DPRD (BANMUS)³²

D. Penutup

Kesimpulan

Sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peran Badan Permusyawaratan (BANMUS) meliputi koordinasi hal-hal yang berkaitan dengan agenda kegiatan dewan, mengadakan dengar pendapat, menetapkan waktu untuk pembahasan peraturan daerah (Perda), dan memberikan kesempatan kepada semua perangkat dewan untuk menyampaikan masukan.

Kedudukan Badan Permusyawaratan sangat strategis, khususnya sebagai perencana, dan Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan (BANMUS) mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Badan Permusyawaratan dapat dibandingkan menjadi "petugas pemadam kebakaran" ketika kuorum rapat paripurna terhenti. Meski sempat tertunda, kuorum pengambilan keputusan rapat paripurna

³² Ibid Hlm.1

DPRD mengenai hak angket dan hak mengeluarkan pendapat diundur selama tiga hari. Saat ini terjadi, keputusan Badan Permusyawaratan menjadi sangat penting. Misalnya, rapat tidak bisa memutuskan bagaimana menggunakan hak angket, bagaimana mengeluarkan pendapat, memecat pimpinan DPRD, atau membuat peraturan daerah, dan rapat paripurna DPRD tidak bisa diulang. Baik buruknya kinerja Dewan dan anggotanya juga dipengaruhi oleh Badan Permusyawaratan

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Gaffar Karim. 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abdilla Fauzi Achmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. Golden Terayon Press. Jakarta
- Dadang Suwanda dan Chabib Soleh. 2016. *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/ LKPD Audited serta TLHP BPK*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung
- Franz Magnis -Suseno. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Hendra Karianga. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Alumni. Bandung.
- Jazim Hamidi dkk(Green Mind Community). 2002. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media. Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. BIP Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, Dan Daerah Otonomi Khusus*. Refika Aditama. Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo. Jakarta.
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Siswanto Sunarno. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta
- Utang Rosidin. 2019. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.

Jurnal:

Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Akademika*, 9(1), 41-49.

M. Agus Santoso. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum* No 4. Vol. 18 Oktober 2011: 604-620. Hlm. 605 <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.43 wita

<https://pustaka.unpad.ac.id> di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 15.00 wita

I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami dan I Ketut Sudiarta. *Makalah Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Universitas Udayana Hlm.3

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 162-172.